

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. MAN 1 Banjarmasin

MAN 1 Banjarmasin adalah madrasah tingkat menengah sederajat SMU yang berciri khas agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah ini dahulunya adalah Madrasah Persiapan IAIN (SP IAIN) yang statusnya dinegerikan menjadi MAN 1 Banjarmasin pada tahun 1977 dan merupakan MAN tertua di kota Banjarmasin.

Madrasah ini mempunyai visi yang ingin dicapainya yaitu: “Mewujudkan sumber daya manusia yang Islami, berkualitas, dan berdaya saing tinggi serta mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat”. Sedangkan misi madrasah adalah:

1. Menyiapkan pemimpin masa depan yang menguasai sains dan teknologi, berdaya saing tinggi, kreatif dan inovatif, serta mempunyai landasan iman dan taqwa yang kuat;
2. Meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan;
3. Menjadikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin sebagai model pengembangan pendidikan dan pengajaran Iptek dan Imtaq bagi lembaga pendidikan lainnya.

Madrasah ini juga memiliki tujuan yang merupakan capaian jangka panjang yang ingin diwujudkan, yaitu:

1. Membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa.
2. Membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani, serta berdisiplin tinggi.
3. Membentuk manusia yang cerdas, berpengetahuan dan menguasai sains dan teknologi.
4. Membentuk manusia yang berkepribadian dan mandiri.
5. Membentuk manusia yang mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dan keunggulan.
6. Membentuk manusia yang mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Membentuk manusia yang bertanggungjawab atas pengembangan umat, bangsa dan negara.

2. MAN 2 Banjarmasin

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin adalah lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia yang mendapatkan mandat untuk mengemban amanah sebagai madrasah umum berciri khas agama Islam, yang mengembangkan kemampuan akademik, non akademik, dan akhlak al-karimah.

Secara historis, madrasah ini cikal bakalnya berawal dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 Tahun Banjarmasin yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 1951. Pada tahun 1957, PGAN 4 Tahun ditingkatkan menjadi PGAN 6 Tahun dan lokasinya dipusatkan di Komplek Pelajar Mulawarman Banjarmasin. Karena lokasi di Komplek Mulawarman terlalu sempit dan tidak memungkinkan

untuk dikembangkan, maka sejak tahun 1987 direlokasi dari Komplek Mulawarman ke Jl. Tembus Terminal (Jl. Pramuka Km.6) di lokasi sekarang ini. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990, berdasarkan KMA No.64 tahun 1990 tanggal 25 April 1990, PGAN beralih fungsi menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Berdasarkan Surat Dirjen Binbaga Islam No. E.IV/PP.00/A2/445/94 tanggal 1 Maret 1994, MAN 2 Banjarmasin ditunjuk sebagai MAN Model Kalimantan Selatan.

Hingga kini, madrasah yang berada di Jl. Pramuka Komplek Semanda, RT.20 No. 28 Banjarmasin Timur ini secara berkesinambungan terus berpacu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan, sehingga saat ini telah menjadi salah satu madrasah favorit dan unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara kualitatif, hal ini dibuktikan dengan indikator terus meningkatnya kepercayaan masyarakat yang bergabung untuk memasukkan putra-putrinya dan turut berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin. Dan secara kuantitatif ditunjukkan dengan aneka prestasi yang berhasil diraih peserta didik MAN 2 Model Banjarmasin, baik di bidang akademik maupun non akademik dari tahun ke tahun.

Madrasah ini mempunyai visi sebagai berikut: Mewujudkan peserta didik yang Islami, berkualitas, terampil, berbudaya lingkungan dan berdaya saing tinggi. Sedangkan misi yang ingin dikembangkannya adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan terpadu antara dunia dan akhirat.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi mutu, berilmu, terampil, cerdas dan mandiri, sehingga mampu bersaing di dunia Internasional.

3. Menyelenggarakan pendidikan yang hasilnya memberikan kepuasan kepada masyarakat.
4. Mengembangkan implementasi madrasah sehat dan berbudaya lingkungan.
5. Menyelenggarakan pendidikan dengan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Nilai-nilai yang di kembangkan :

1. Aqidah Islam, Akhlaqul Karimah, dan Nilai Ilmiah.
2. Kekeluargaan dan Kebersamaan.
3. Mandiri, hemat dan bertanggung jawab.
4. Berbudaya lingkungan.
5. Sederhana dan Kreatif.

3. MAN 3 Banjarmasin

Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin berasal dari Madrasah Aliyah swasta yang merupakan gabungan dari Madrasah Aliyah Mulawarman (MAM) dan Madrasah Aliyah al Abadiyah. MAM pada waktu itu kegiatan belajarnya di gedung PGAN Banjarmasin yang berlokasi di Komplek Mulawarman. PGAN Banjarmasin pada tahun 1979 berpindah ke jalan Pramuka Km. 6 Banjarmasin, sehingga gedung PGAN Mulawarman kosong. Dengan kosongnya gedung PGAN tersebut timbul prakarsa dari beberapa orang dewan guru dari PGAN untuk mendirikan MAM diantaranya: Drs. Roi Syukur, Drs. Bachtiar Suriani, Drs. Syamsuni Eddy dan Drs. H. Usman Djafri. Berdasarkan musyawarah mereka yang bertempat di asrama PGAN Mulawarman diputuskan membentuk Madrasah

Swasta dengan lokasi di Mulawarman yaitu MAM dengan Kepala Madrasah adalah Drs. Roi Syukur. (1979-1983), kedua Drs. M. Zaini. (1983-1988), ketiga Drs. H. Baderi (1988) kemudian digantikan oleh H. Asmuri Ch (1988). Sedangkan 1987 didirikan pula Madrasah Swasta yang bernama MAS Al Abadiyah yang berlokasi di Km. 6 PGAN Banjarmasin, dengan Kepala Drs. Hermawan Suyono.

Perkembangan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1990 terjadilah penggabungan antara MAM dan MAS Al Abadiyah yang dikelola oleh Yayasan Al Abadiyah. Setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun penggabungan tersebut, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1993 MAM dinegerikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 244 tanggal 22 Oktober 1993, dengan Kepala Madrasah pertama adalah H. Asmuri Ch (tahun 1993-1998). Pada awal mulanya, proses KBM berlangsung di gedung eks PGAN 6 tahun di tanah milik Yayasan Milono dengan luas tanah 3.632 M², searah dengan perkembangan dan pertumbuhan MAN yang terus melaju, terbesit ingin memiliki gedung permanen. Alhamdulillah keinginan tersebut terwujud pada tahun 1996-1997 hingga sekarang dengan bertambahnya gedung sarana belajar.

Madrasah ini memiliki visi yaitu: Mewujudkan lembaga pendidikan yang melahirkan insan beriman, bertaqwa, berkualitas, berwawasan, berbudaya lingkungan hidup dan berwawasan global. Visi tersebut di atas mencerminkan cita-cita madrasah yang berorientasi ke depan dengan *indikator* sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pembelajaran secara efektif dan efisien berbasis imtaq, TIK dan Lingkungan Hidup dengan didukung oleh tenaga yang profesional handal dan berwawasan, berbudaya lingkungan hidup.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran serta sumber belajar yang memadai berbasis TIK dan lingkungan hidup.
- c. Menumbuhkan motivasi berprestasi warga madrasah bidang akademik dan non akademik.
- d. Menyediakan wahana pembinaan untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa dibidang IMTAQ, IPTEK, Olahraga dan Seni secara terarah dan berkelanjutan sebagai kecakapan hidup.
- e. Menanamkan kesadaran dan memantapkan kepedulian siswa terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai upaya pelestarian, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- f. Meningkatkan kegiatan partisipatif melalui program keindahan lingkungan dan memperindang hutan madrasah dalam rangka menciptakan / pelestarian lingkungan yang kondusif terhadap aktivitas pendidikan.
- g. Menyediakan wahana komunikasi dan koordinasi antara madrasah, orang tua, siswa, masyarakat dan instansi terkait untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan lingkungan hidup di MAN 3 Banjarmasin.

Misi madrasah adalah:

1. Melaksanakan pembelajaran, bimbingan dan pembinaan secara efektif.
2. Menumbuhkan semangat motivasi berprestasi melalui kegiatan ekstra kurikuler.

3. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam melalui kegiatan keagamaan (tadarus Al Qur'an, Tahfizh, KSI, Maulid Al Habsy, pembacaan kitab kuning).
4. Memberikan kemampuan akademik, penguasaan IPTEK serta keterampilan untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja.
5. Mengembangkan nilai-nilai demokratis dan meningkatkan kemandirian serta tanggap terhadap lingkungan.

Adapun tujuan yang menjadi program jangka panjang madrasah adalah:

1. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta peduli terhadap lingkungan hidup dan berwawasan global.
2. Mencapai kelulusan 90% dengan NUM dan NUN lulus setiap mata pelajaran di atas standar kelulusan yang ditetapkan secara nasional.
3. Minimal 90% siswa berminat meneruskan ke Perguruan Tinggi dan 80% diterima di Perguruan Tinggi yang menjadi pilihannya.
4. Setiap lulusan dapat menjalankan ajaran agamanya dengan benar.
5. Memiliki Rohis (Kerohanian Islam) dengan pembinaan secara khusus.
6. Memiliki kelompok ilmiah remaja (KIR) yang handal dan menghasilkan karya tulis serta siap mengikuti lomba (LPKIR) yang mengangkat tema lingkungan hidup dan meraih prestasi minimal ditingkat kabupaten/kota.

7. Memiliki kelompok bahasa Inggris yang handal dan siap tanding.
8. Memiliki kelompok Sain (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Kebumihan, Ekonomi dan Komputer) yang siap mengikuti lomba olimpiade sain dan meraih prestasi 1 atau 2 dan atau 3 tingkat kabupaten/kota.
9. Memiliki klub olah raga yang tangguh dan siap tanding dengan meraih prestasi 1 atau 2 dan atau 3 tingkat kabupaten / kota.
10. Memiliki tempat ibadah (mushalla).
11. Memiliki kelompok-kelompok siswa yang aktif dalam bidang pramuka, UKS/PMR, Sipala, Koperasi siswa dan Seni yang berperan aktif dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.
12. Memiliki halaman madrasah yang berdaya serap tinggi terhadap air hujan (paving blok, biovori dan sumur resapan).
13. Memiliki akses internet yang mudah.
14. Memiliki taman madrasah, taman kelas, Toga, hidroponik, hutan madrasah dan keanekaragaman hayati dalam mendukung pembelajaran lingkungan hidup.
15. Memiliki sarana dan prasarana multimedia pembelajaran (LCD Proyektor, Layar.
16. Memiliki kantin sehat madrasah yang ramah lingkungan.
17. Memiliki Bank Sampah.

B. Paparan Data Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Tata Tertib Siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Banjarmasin

a. MAN 1 Banjarmasin

Di MAN 1 Banjarmasin penyusunan tata tertib madrasah dilakukan oleh seluruh pihak terkait dimulai dari kepala madrasah, Wakil Kepala madrasah bidang kesiswaan dan humas unsur guru seperti Guru Agama dan Guru Bimbingan dan Konseling. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah, Hj. Naini Pristiana bahwa:



(Foto wawancara dengan Ibu Kepala MAN 1 Banjarmasin – 5-10-2018)

“Tata tertib madrasah dibuat untuk memberikan jaminan menciptakan suasana yang kondusif sehingga mendukung penyelenggaraan pendidikan. Salah satu aspek yang terpenting dari suatu kegiatan penyusunannya haruslah adanya suatu perencanaan yang memberikan tujuan dan arah tata tertib yang melibatkan seluruh unsur terkait. Perencanaan tersebut dilakukan dengan merumuskan model tata tertib yang akan diberlakukan di madrasah ini (W/K. MAN 1 Banjarmasin).

Hal yang sama juga disampaikan oleh wakamad kesiswaan bahwa:

“Sebelum penetapan tata tertib tentunya dilakukan langkah langkah penting seperti merumuskan hal-hal penting dalam penerapan tata tertib

madrasah dengan dipimpin langsung oleh kepala madrasah dan dihadiri oleh pihak terkait. Penyusunan tata tertib melibatkan atau mengakomodasi aspirasi siswa dan aspirasi orangtua siswa yang dianggap sesuai dengan visi dan misi madrasah”. (W/WK. MAN 1 Banjarmasin)



(Wawancara dengan Ibu Waka Madrasah Kesiswaan, Hj. Rita Zahara – 10-10-2018)

Dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa proses perencanaan dilakukan dengan merumuskan sistem tata tertib yang akan digunakan di madrasah. Perumusan yang dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam memberikan masukan-masukan berkaitan dengan system yang tata tertib madrasah. Selanjutnya penulis melakukan beberapa wawancara dengan unsur guru, salah satunya guru bimbingan konseling yang menjelaskan bahwa:



(Wawancara dengan Koordinator BK MAN 1, Ibu Nani T – 5-10-2018)

“Tata tertib madrasah dibuat untuk memberi ruang pengembangan kreativitas siswa dalam mengespresikan diri dan mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Semua aturan disiplin dan tata-tertib yang berkaitan beserta sanksi atas pelanggarannya, merupakan hasil kompromi semua pihak”. (W/G. BK. MAN 1 Banjarmasin)

Dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa perumusan tata tertib peserta didik melibatkan seluruh warga madrasah antara lain kepala madrasah, wakil kepala madrasah dan guru, bahkan juga dibahas ditingkat Osis yang memiliki tujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui kode etik saja, namun lebih memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Perumusan tata tertib peserta didik ini menjadi pedoman peserta didik untuk mengatur tingkah laku peserta didik. Melalui musyawarah dan hasil rapat dewan guru, kepala madrasah beserta wakamad merumuskan tata tertib dengan menggunakan dasar nilai-nilai keislaman karena di dalamnya mengatur tentang tingkah laku peserta didik untuk tertib, disiplin dan taat pada peraturan yang berlaku di madrasah.

Selanjutnya penulis juga melakukan penelusuran berkaitan dengan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses perencanaan atau perumusan tata tertib di madrasah, Kepala MAN 1 menjelaskan bahwa:

“Untuk tata tertib merupakan wewenang dari kesiswaan, jadi wakil kepala madrasah bidang kesiswaan yang bertanggungjawab terhadap penggodokan atau pembuatan tata tertib ini. Sedangkan unsur lain diminta untuk memberikan masukan terhadap tertib ini. Berkaitan dengan langkah langkah apa saja yang digunakan dalam merumuskan tata tertib tentunya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari tata tertib”.

Berkaitan dengan proses penyusunan atau langkah-langkah yang digunakan dalam merumuskan tata tertib seperti yang disampaikan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, bahwa:

“Tata tertib dibuat tentunya dengan perencanaan yang matang dan dipersiapkan terlebih dahulu, seperti dalam merumuskan tata tertib kami terlebih dahulu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan yang kami inginkan dari adanya tata tertib ini. Selanjutnya dalam menyusun tata tertib kami juga mengacu kepada keadaan sekarang/saat ini. Kami juga Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi. Selanjutnya kami merumuskan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan”.

Dengan demikian dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa dalam merumuskan tata tertib menggunakan langkah-langkah penting di mana proses dibahas sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan tata tertib dapat mempertimbangkan kondisi, dan aspek penting dalam perencanaan tata tertib adalah menetapkan keputusan yang sesuai dengan kondisi madrasah.

Lebih jelasnya dalam perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan atau tujuan utama yang akan dicapai. Perumusan dimulai dengan masukan-masukan pihak terkait tentang tujuan dari tata tertib dengan tidak lepas dari visi misi madrasah. Selanjutnya madrasah juga dalam menyusun tata tertib madrasah terlebih dahulu membahas keadaan saat ini, seperti persoalan-persoalan atau kenakalan yang menjadi fenomena di madrasah untuk dimasukkan dalam tata tertib. Pemahaman akan posisi madrasah sekarang dari tujuan yang hendak

dicapai merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut identitas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Setelah keadaan madrasah dan fenomena siswa dibahas saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama dari guru BK bahkan dari siswa sendiri seperti Osis.



(Wawancara dengan guru BK MAN 1, Bapak Hasbi – 17-10-2018)

Setelah merumuskan tata tertib yang sesuai dengan kondisi madrasah maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dalam implementasi tata tertib sehingga dapat dipahami oleh seluruh siswa. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan madrasah dengan sumber daya dalam mencapai tujuan adanya tata tertib. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat membantu madrasah mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah.

Selanjutnya langkah terakhir setelah tata tertib dirumuskan adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk implementasi tata tertib

agar tercapai sesuai keinginan. Paparan data berkaitan dengan tahapan implementasi tata tertib yang telah dirumuskan dijelaskan oleh wakamad bidang kesiswaan bahwa:

“Tata tertib yang telah disusun, disepakati dan disahkan kepala madrasah disosialisasikan secara berkelanjutan kepada seluruh siswa, dalam hal ini siswa, guru, orangtua siswa, dan pengurus komite madrasah.” (W/WK. MAN 1)

Lebih jauh dijelaskan bahwa sosialisasi untuk orang tua siswa dan pengurus komite madrasah juga dilakukan dengan cara mengirimkan tata tertib yang telah dibuat dalam bentuk tertulis. Salah satu guru juga menjelaskan bahwa:



(Wawancara dengan ibu Dessy – 17-10-2018)

“Dalam membentuk disiplin siswa melalui implementasi tata tertib perlu adanya sosialisasi terhadap tata tertib kepada siswa. Ada beberapa langkah yang kami lakukan dalam implementasi tata tertib yaitu dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan madrasah yakni dengan mengirimkan tata tertib atau memanggil orang tua. (W/G. MAN 1 Banjarmasin)

Ungkapan guru tersebut didukung lagi dengan pernyataan Ibu kepala MAN 1 yang menjelaskan bahwa:

“Cara madrasah dalam melakukan sosialisasi tata tertib madrasah adalah dengan mengundang orang tua untuk hadir ke madrasah untuk menyampaikan isi tata tertib kepada semua orang tua. Selain itu, tim Tata Tertib juga berkeliling dan masuk ke dalam kelas-kelas pada jam pelajaran yang kebetulan guru mata pelajarannya tidak bias masuk untuk memberi

pengarahan tata tertib kepada siswa agar tidak keluar kelas saat jam kosong.” (W/K. MAN 1 Banjarmasin)

Kepala madrasah menambahkan bahwa komunikasi merupakan hal yang mendasar bagi suksesnya program karena berhubungan dengan manusia yang lainnya. Untuk itu sosialisasi ataupun komunikasi merupakan proses penyampaian program kepada orang tua siswa untuk memberitahu agenda-agenda madrasah baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui siswa dengan mengirim tata tertib.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tata tertib madrasah sangat tergantung pada pemahaman pihak-pihak terkait terhadap tata tertib yang disusun, maka dilakukanlah sosialisasi. Karena itu sosialisasi tata tertib perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik isi tata tertib tersebut. Tahapan terakhir dalam implementasi tata tertib adalah pengawasan yang dilakukan atas berjalannya tata tertib dan evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan tata tertib. Dalam konteks ini, pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan pencapaian program kerja termasuk kebijakan tata tertib. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan data di lapangan, Kepala MAN 1 menjelaskan bahwa:

“Pengawasan kebijakan tata tertib pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan tidak tercapainya tujuan yang akan dicapai. Untuk itu, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Untuk ini semua

komponen termasuk guru harus dapat menilai sejauh mana tata tertib dilaksanakan. Dan tentunya menjadi tanggungjawab wakil kepala madrasah bidang kesiswaan.”

Dengan demikian fungsi kepengawasan kebijakan tata tertib adalah membantu seluruh pihak terkait dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan kepada kepala madrasah. Oleh karena kepala madrasah juga memberikan arahan kepada tim, sehingga tata tertib yang dibuat dapat diterapkan dengan baik dan berjalan secara efektif untuk memperoleh hasil yang maksimal. Lebih jauh menurut wakil kepala bidang kesiswaan bahwa:

“Pengamatan atas pelaksanaan seluruh aktivitas berkaitan tata tertib yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh rancangan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. Selain itu kami juga melakukan pengamatan atas kinerja pihak terkait dalam melaksanakan tata tertib. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Hal ini dilakukan untuk pengendalian atau *controlling*.”

Dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa pengawasan terhadap kebijakan tata tertib adalah adalah proses untuk menjamin segala kebijakan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Lebih lengkapnya pengawasan terhadap program tata tertib merupakan usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses melihat hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi/perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal ini wakil kepala madrasah bidang kesiswaan juga membenarkan pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan tata tertib. Dalam hal ini pengawasan dilakukan merupakan proses pengendalian atau pengawasan atau melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan tata tertib sehingga rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dan dapat terselenggara dengan baik. Dalam uraian tersebut menggambarkan bahwa pengendalian atau pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan berupa; pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Problematika yang dihadapi dalam penegakan tata tertib madrasah di MAN Kota Banjarmasin hampir sama yaitu konsistensi guru dalam penegakan tata tertib madrasah masih belum terealisasi dengan baik. Hal itu karena ada sebagian guru yang konsisten dalam menegakkannya, namun ada pula sebagian guru yang kadang-kadang kurang konsisten, bahkan terkesan tidak peduli terhadap pelanggaran tata tertib di madrasah tempatnya bekerja. Seperti yang disampaikan oleh kepala MAN 1 bahwa:

“Pengawasan terhadap anak sebenarnya bukan saja menjadi tanggung jawab Kepala maupun wakil, maupun guru BK, tetapi merupakan tanggung jawab semua unsur yang terlibat di madrasah. Baik itu guru atau staf Tata Usaha. Apalagi madrasah tersebut memiliki siswa yang banyak. Disini dituntut semua pihak lingkungan madrasah untuk selalu proaktif dalam melakukan pengawasan. Akan tetapi hal ini belum dipahami seutuhnya, mengingat beberapa anak tidak segan melanggar dihadapan oknum guru, karena mereka memahami tidak ditegur ataupun guru tersebut cuek. Hal inilah yang menjadi kendala kami”.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam implementasi. Pada garis besarnya siklus kebijakan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan serta
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Pembahasan ini berdasarkan temuan di lapangan dengan menganalisisnya berdasarkan kaca mata manajemen, khususnya fungsi manajemen. Di MAN 1 Banjarmasin penyusunan tata tertib madrasah dilakukan oleh seluruh pihak terkait dimulai dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan dan humas, unsur guru, seperti Guru Agama dan Guru Bimbingan dan Konseling serta komite madrasah.

Langkah-langkah penyusunan tata tertib di MAN 1 Banjarmasin memang terdapat perbedaan dengan madrasah lain, namun demikian secara umum langkah-langkah yang ditempuh dalam proses perencanaan/perumusan tata tertib dilakukan secara sistematis mulai dari tahapan penggalian data, perumusan tujuan hingga melakukan evaluasi atau pengawasan. Langkah ini tentunya sesuai dengan sistematika perencanaan, dimana perencanaan merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan yaitu: (1). perumusan tujuan yang ingin dicapai, (2).

pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, (3). identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.

Selanjutnya yang menjadi catatan penulis dalam penelitian ini adalah proses perencanaan dibuat secara kolektif, yaitu melibatkan berbagai pihak (kolektif), baik kepala madrasah sebagai pimpinan, wakil kepala madrasah, unsur guru, unsur siswa bahkan juga melibatkan perwakilan orang tua siswa. Di sisi lain, pihak-pihak yang dilibatkan dalam perumusan tata tertib memang diharapkan dapat memberikan kontribusi teknis mengenai cara atau model tata tertib, perilaku yang dilarang, strategi implementasi tata tertib, dan konsekuensi dari tertib yang diberlakukan, baik atau buruk. Sehingga, tata tertib dapat dipertanggungjawabkan.

Pelibatan pihak-pihak terkait dalam perencanaan bisa disebut sebagai perencanaan partisipatif, yaitu proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah ini, dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (*stakeholders*). Tujuannya agar setiap guru diharapkan mampu memberikan masukan sesuai dengan pengetahuannya.

Di sisi lain menurut penulis pelibatan berbagai pihak dalam merencanakan atau merumuskan tata tertib madrasah sebagai bagian dari pengorganisasian. Di mana setiap pihak yang dilibatkan memiliki tanggungjawab masing-masing. Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Setelah perencanaan ataupun perumusan tata tertib maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Sejauh ini

pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dirumuskan oleh tim dari sejak awal.

Berbeda dengan pelaksanaan, pengawasan dilakukan tidak secara terprogram, artinya pengawasan dilakukan hanya pada saat-saat penting saja. Padahal pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dilaksanakan dalam melihat kebijakan tata tertib. Bila mengacu pada teori pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang dipergunakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi dan mengukur penampilan/ pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan dilakukan seiring dengan proses, sejak awal sampai akhir. Oleh karena itu pengawasan juga meliputi monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur.

Kegiatan pengawasan merupakan upaya melakukan evaluasi berdasarkan standar pengawasan yang ketat dan mengupayakan tindak lanjut secara tepat demi

perbaikan organisasi di masa mendatang. Pengawasan yang baik mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

- 1) Prinsip pencapaian tujuan (*principle of assurance of objective*), pengendalian harus ditujukan ke arah pencapaian tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindarkan penyimpangan dari perencanaan.
- 2) Prinsip efisiensi pengendalian (*principle of efisience of control*), pengendalian efisiensi bila dapat menghindarkan deviasi-deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan.
- 3) Prinsip tanggung jawab pengendalian (*principle of control of responsibility*). Pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila manajer dapat bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana.
- 4) Prinsip pengendalian terhadap masa depan (*principle of future control*). Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan, penyimpangan, perencanaan yang terjadi, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- 5) Prinsip pengendalian langsung (*principle of direct control*). Teknik kontrol yang paling efektif adalah seorang manajer yang mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan ialah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.

- 6) Prinsip refleksi perencanaan (*principle of reflection of plan*). Pengendalian harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
- 7) Prinsip pengendalian individual (*principle of individuality of control*). Teknik dan pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengendalian harus ditujukan kepada kebutuhan-kebutuhan informasi setiap manajer. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain tergantung pada tingkat tugas manajer.
- 8) Prinsip pengawasan terhadap strategis (*principle of strategic point control*). Pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan perhatian yang ditentukan terhadap faktor-faktor yang strategis perusahaan.
- 9) Prinsip peninjauan kembali (*principle of review*). Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- 10) Prinsip tindakan (*principle of action*). Pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran rencana organisasi, *staffing*, dan *directing*. Kelemahan pengawasan yang dilakukan selama ini tidak dilakukan secara komperhensif.

Siswa menurut ketentuan umum Undang-undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Siswa juga mempunyai sebutan lain seperti murid, subjek didik, anak didik, pembelajar dan sebagainya. Apapun istilahnya, yang jelas siswa adalah mereka yang sedang mengikuti program pendidikan pada suatu madrasah atau jenjang pendidikan tertentu.

Berdasarkan hasil dilapangan bahwa problematika yang dialami madrasah dalam implementasi tata tertib bersumber dari dua faktor yaitu faktor dari guru dan siswa. Hal ini karena ada guru yang tidak memberi sanksi kepada siswa sehingga sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan. Persoalan guru dalam penegakan tata tertib tentunya harus menjadi catatan penting dan harus diberikan evaluasi. Padahal sosok guru memegang peranan signifikan dalam menentukan kualitas proses dan out put pendidikan. Sebagai salah satu komponen yang menggerakkan roda sistem pendidikan, posisi guru tidak hanya sebagai pentransfer ilmu (*knowledge*), akan tetapi lebih dari itu guru juga merupakan teladan yang memiliki sikap (*attitude*) yang baik.

Profesionalisme guru dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kompetensi-kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah: kompetensi bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, kompetensi bidang pendidikan nilai dan bimbingan serta kompetensi bidang hubungan dan pelayanan/pengabdian masyarakat.

Pengawasan guru terhadap tata tertib yang menjadi pedoman siswa harusnya dipahami guru sebagai tanggungjawabnya. Seperti yang dijelaskan bahwa seorang guru dikatakan profesional bilamana ia juga mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap tugas, sikap komitmen terhadap tugas dan mutu hasil kerja, serta sikap *continous improvemen*, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman.

Selanjutnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran siswa untuk mematuhi tata tertib madrasah merupakan faktor penghambat dalam pembentukan disiplin siswa. Faktor eksternal lainnya adalah faktor keluarga dan ekonomi keluarga. Orang tua yang bercerai dan ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan pembentukan disiplin siswa melalui implementasi tata tertib mengalami hambatan.

b. MAN 2 Banjarmasin

Pelibatan berbagai pihak dalam penyusunan tata tertib juga dilakukan di MAN 2 Model Banjarmasin, seperti yang disampaikan oleh kepala madrasah bahwa:

“Tata tertib madrasah tidak hanya dibuat berupa konsep yang harus dipatuhi oleh siswa dengan sanksi tetapi juga untuk mengkondisikan madrasah yang bisa membuat orang untuk tidak melakukan pelanggaran. Untuk itu kami perlu hati-hati dalam menyusunnya, sehingga kami pun melibatkab berbagai pihak dalam menyusunnya, seperti kepala madrasah, wakail kepala, unsure guru, kami undang juga perwakilan osis dan bahkan orang tua”. (W/K-MAN 2 Banjarmasin)

Selanjutnya wakil kepala bidang kesiswaan juga menjelaskan bahwa: “Tata tertib tidak hanya memberi sanksi siswa dari segi fisik saja, tetapi juga untuk membentuk mental disiplin agar disiplin dan juga membangun kesadaran bahwa tata tertib itu memiliki nilai kebenaran sehingga perlu untuk ditaati. Atas dasar itu, dalam penyusunannya kami berupaya tata tertib ditaati karena adanya kesadaran siswa. Untuk menghasilkan tata tertib semacam itu, dalam penyusunannya tata tertib melibatkan berbagai pihak terkait seperti kepala, wakil, guru BK, guru agama dan unsure siswa.” (W/WK/MA 2)

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan di atas, salah satu guru yang dilibatkan dalam penyusunannya menjelaskan bahwa:

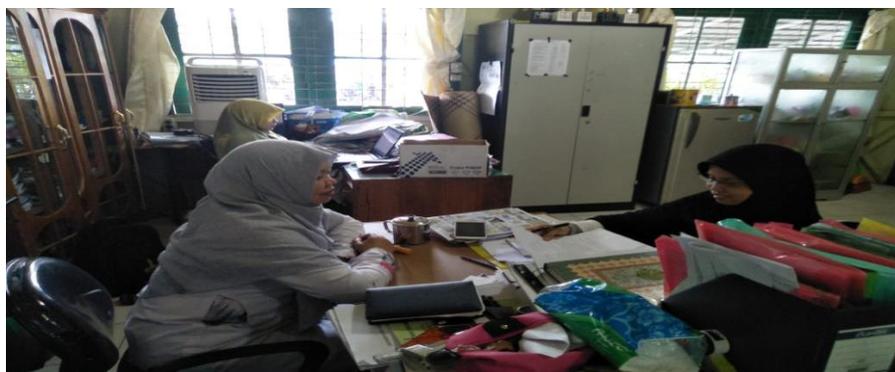
“Tata tertib beserta sanksi-sanksinya diarahkan untuk membangun budaya sikap disiplin. Dalam penyusunannya kami juga dilibatkan untuk memberikan masukan berkaitan dengan tata tertib yang di susun.” (W/GMA 2)

Selanjutnya di madrasah ini menetapkan tata tertib beserta sanksi-sanksinya disusun mengacu pada prosedur dalam manajemen seperti merumuskan langkah-langkah dalam penyusunan tata tertib mulai dari merencanakan sampai pada level pengawasan. Selanjutnya juga dibahas format penyusunan aturan tata tertib dibuat dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam hal ini kepala MAN 2 menjelaskan bahwa:

“Wakamad kesiswaan sebagai kepala TIM dapat mengorganisasi, mengarahkan, atau mengawasi, dalam membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah dibuatnya tata tertib. Dalam membuat dan menentukan kegiatan penyusunan tata tertib, tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan tetapi harus melewati beberapa tahap untuk mendapatkan hasil perencanaan yang matang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari tata tertib”.



Wawancara dengan Bapak Drs. Riduansyah, M. Pd (Kamad MAN 2 Banjarmasin)



Wawancara dengan ibu Siti Rostina, M. Pd (Wakasis MAN 2 Banjarmasin)

Berkaitan dengan proses penyusunan atau langkah-langkah yang digunakan dalam merumuskan tata tertib seperti yang disampaikan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, bahwa:

“Cara untuk melaksanakan fungsi perencanaan dalam penyusunan tata tertib, haruslah sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan yang telah disesuaikan dengan tipe tujuan atau hasil dari tata tertib tersebut. perencanaan tata tertib mempunyai tahapan-tahapan yang tidak jauh berbeda berbeda. Ada beberapa langkah yang kami lakukan yaitu dengan melibatkan berbagai pihak terkait, pengumpulan data-data tentang tata tertib, merumuskan tujuan, melihat berbagai persoalan dalam tata tertib, pelaksanaan dan pengawasan”.

Dari hasil wawancara di atas ditemukan ada beberapa langkah penting yang dilakukan pihak madrasah dalam merumuskan tata tertib. Terlebih dahulu pihak madrasah melibatkan berbagai pihak terkait dalam merumuskan tata tertib. Selanjutnya melakukan pengumpulan data, merupakan suatu proses mencari informasi yang memadai berkaitan dengan tata tertib baik pola yang digunakan maupun landasan nilai yang dipakai dalam penyusunan tata tertib.

Langkah selanjutnya yang dilakukan merumuskan tujuan dan target yang akan dicapai melalui tata tertib ini. Tujuan dan target dilakukan pada tahap awal dari siklus perencanaan. Kegiatan perumusan tujuan diarahkan untuk menghasilkan berkenaan dengan pencapaian yang diinginkan dari hasil tata tertib, yang dapat menjadi pedoman nyata dalam menentukan tindakan yang sesuai untuk mencapainya, kemudian mencari persoalan-persoalan penting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan tata tertib. Hal ini merupakan titik mula untuk mencari formula tata tertib yang sesuai dengan kondisi madrasah. Selanjutnya melakukan analisis terhadap tata tertib yang dirumuskan. Analisis data dasar, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menilai keadaan atau kondisi

tata tertib yang kontekstual atau perilaku yang sering melanggar norma atau nilai-nilai keislaman sehingga tata tertib relevan dengan kondisi saat ini. Dari sinilah biasanya muncul aturan-aturan baru yang harus ditaati dalam tata tertib.

Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap tata tertib yang sudah berjalan. Jika terdapat serangkaian tindakan yang mungkin dapat diidentifikasi, tugas tim selanjutnya adalah membandingkan secara rinci kekurangan dan kelebihan antar alternatif dari tata tertib terdahulu sehingga dapat memberikan informasi kepada tim penyusun untuk memilih alternatif terbaik. Identifikasi alternatif, pada tahap ini dikemukakan berbagai alternatif rencana, kebijakan atau pemecahan persoalan yang mungkin beserta variasi dan kombinasi antara alternatif utamanya.

Setelah tata tertib sudah terusun maka langkah pembahasan selanjutnya adalah strategi Implementasi atau tahapan pelaksanaan, merupakan suatu proses pelaksanaan tata tertib bagi seluruh siswa di madrasah. Tahapan ini juga diiringi dengan pengawasan merupakan dua tahap terakhir dari proses perencanaan sebelum memulai siklus proses perencanaan yang baru. Pengawasan pada dasarnya mengacu pada aktivitas untuk mengukur pencapaian dalam suatu rencana. Pemantauan memberikan masukan bagi sistem pelaporan internal, yang dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, mengantisipasi persoalan atau mendiagnosanya secara lebih dini sehingga tindakan koreksi jika diperlukan dapat dilakukan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat membuat siswa dan orang tua siswa memahami mengenai tata tertib adalah dengan melakukan sosialisasi. Untuk membangun sebuah pemahaman tata tertib madrasah kepada

siswa, maka madrasah membutuhkan konsep dalam mensosialisasikan atau mengkomunikasikan tata tertib tersebut kepada seluruh siswa dan orang tua. Pemilihan konsep sosialisasi yang akan digunakan bergantung pada situasi dan kondisi. Langkah inilah yang dirumuskan oleh MAN 2 Banjarmasin dalam sosialisasi tata tertib. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi tata tertib dikemukakan berikut ini.

“Cara madrasah dalam melakukan sosialisasi dengan memberikan tata tertib, menempel tata tertib, memasukkannya dalam berbagai arahan seperti apel dan bahkan memanggil orang tua siswa ketika penerimaan siswa baru. Orang tua siswa dikumpulkan di aula untuk mendapatkan pengarahan dari terkait tata tertib.” (W/K MAN 2 Banjarmasin)

Hal yang sama juga disampaikan oleh wakil kepala madrasah bahwa kegiatan terpenting dalam menguji efektivitas tata tertib adalah pada pelaksanaannya. Di sini terkait dengan sejauh mana upaya pihak madrasah dalam menegakkan tata tertib yang telah disusun. Sebab betapapun baiknya tata tertib tapi jika tidak ditegakkan secara konsekuen maka tidak akan banyak artinya dalam pengembangan budaya dan iklim madrasah. Beberapa pertimbangan dalam penegakan tata tertib dikemukakan berikut ini:

“Tata tertib madrasah sangat penting sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Tata tertib madrasah apa saja yang harus dibuat itu sudah barang tentu amat ditentukan oleh kepentingan madrasah. Penegakan tata tertib madrasah dengan menggunakan langkah – langkah berupa pemasangan di ruang – ruang belajar atau tempat yang strategis sehingga siswa dapat melihat dan membaca, sosialisasi tata tertib madrasah melalui kegiatan Masa Orientasi Siswa

(Matsama) dan pada saat upacara, pekan tata tertib madrasah, pengontrolan siswa setiap hari, sidak/pemeriksaan mendadak ke kelas-kelas”.

Dengan demikian bentuk penegakan tata tertib madrasah yang lainnya adalah sosialisasi tata tertib madrasah pada saat kegiatan-kegiatan resmi seperti upacara dan kegiatan Masa Orientasi Siswa (Matsama). Sosialisasi tata tertib madrasah pada saat upacara dan kegiatan Matsama lebih efektif dan efisien karena siswa berkumpul dalam satu tempat. Selain itu tata tertib diberikan secara berulang-ulang dengan tujuan agar terbentuk pola berpikir siswa dalam menanggapi tujuan terbentuknya tata tertib di madrasah.

Contoh Pelaksanaan tata tertib dengan membiasakan anak-anak untuk mematuhi tata tertib madrasah. Seperti datang tepat waktu sebelum pukul 07.30. Apabila ada yang terlambat anak-anak akan mendapat teguran lisan dan mendapatkan hukuman. Disiplin dan tata tertib madrasah berlaku untuk semua siswa yang ada di madrasah. Di sisi lain Sikap, perilaku, dan tindakan kepala madrasah, guru, dan warga madrasah lainnya, hendaknya menjadi model dan teladan bagi penegakan perilaku tertib dan disiplin di madrasah.

Di MAN 2 ini, penegakan tata tertib terutama difokuskan pada upaya membantu siswa untuk menyesuaikan diri dengan setiap butir dalam aturan tata-tertib tersebut. Penjatuhan hukuman atas pelanggaran tata-tertib disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari pengambilan tindakan tersebut. Sanksi penegakan tata-tertib madrasah dilakukan kepala madrasah atau wakil kepala madrasah urusan kesiswaan. Demi efektifitas layanan BK di madrasah guru pembimbing diharapkan tidak ditugaskan untuk pemberian sanksi terhadap

siswa. Selanjutnya berkaitan dengan pengawasan, wakamad kesiswaan menjelaskan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki”.

Lebih jauh menurut kepala madrasah yang menjelaskan bahwa:

Dalam rangka melakukan pencegahan dan mendisiplinkan siswa guna meraih perbaikan kualitas pendidikan, perlu dilakukan pengawasan (control) terhadap implementasi tata tertib. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui apa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi.

Jika terdapat kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya persoalan-persoalan dikemudian hari.

Sehingga data di lapangan menunjukkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan merupakan suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas pelaksanaan tata tertib yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan berhubungan dengan pelaksanaan tata tertib. Selama ini pengawasan dilakukan seiring dengan proses aktivitas di madrasah, tidak terprogram secara khusus. Hal lainnya yang penulis gali adalah berkaitan dengan faktor-faktor implementasi tata tertib. Seperti yang disampaikan guru BK MAN 2, bahwa:

“Pada dasarnya setiap guru mempunyai tanggungjawab untuk memberi teguran kepada siswa jika melanggar ataupun mengawasi tata tertib siswa. Seandainya tanggung jawab ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka beberapa persoalan akan dapat diatasi. Tetapi ada sebagian guru yang tidak konsisten terhadap tanggungjawabnya memberikan pengawasan, sehingga hal ini berdampak negative dalam implementasi tata tertib”.



Wawancara dengan Pak Ramadhan, SE, S. Pd (Koord.BK MAN 2 Banjarmasin)



Wawancara dengan Ibu Wahidah (Guru BK MAN 2 Banjarmasin)

Data di lapangan menunjukkan ada persoalan konsistensi guru dalam implementasi tata tertib. Adanya persoalan konsistensi menyebabkan siswa tidak menghargai teguran dari Guru. Tidak semua guru melakukan penegakan tata tertib madrasah/lemahnya monitoring karena yang bertugas hanya BK dan Wakil Kepala madrasah Bidang Kesiswaan. Temuan di lapangan terlihat bahwa hambatan yang dialami berkaitan dengan guru yang memberikan sanksi yang berbeda-beda pada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib. Sebagai

contohnya ketika ada siswa yang melanggar maka ada guru yang memberikan hukuman pada siswa berupa teguran saja. Akan tetapi guru kadang juga memberikan sanksi kepada siswa berupa menyuruh siswa untuk membersihkan ruangan ataupun WC. Sedangkan hambatan dari faktor eksternal adalah kesadaran siswa untuk mematuhi tata tertib madrasah masih kurang. Hal ini terbukti dari beberapa peristiwa yang terjadi di madrasah, diantaranya: masih ada siswa yang tidak menggunakan atribut madrasah yang sesuai, masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan, dan masih ada siswa yang ketika guru belum datang ke luar kelas.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil dilapangan bahwa problematika yang dialami madrasah dalam implementasi tata tertib bersumber dari faktor guru dan siswa. Sedangkan dari siswa dari sebab siswa melakukan pelanggaran berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru MAN 2 mengemukakan:

“Meningkatnya angka pelanggaran yang terjadi baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan pada saat tertentu dan memanfaatkan waktu untuk terhindar dari pantauan guruk piket membuat fungsi pengawasan lemah karena masih banyak siswa-siswi melakukan pelanggaran ditempat-tempat tertentu, dan dipengaruhi berbagai factor seperti keluarga ataupun lingkungan”.

Dari hasil ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini jenis pelanggaran tata tertib siswa masih dalam kategori pelanggaran ringan, seperti terlambat atau tidak memakai atribut. Sedangkan untuk sebab terjadinya pelanggaran seperti persoalan yang dating dari keluarga maupun lingkungan.

Secara keseluruhan jika dianalisis temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah penyusunan tata tertib (perencanaan) di MAN 2

Banjarmasin juga sama yang dilakukan di MAN 1 Banjarmasin. Di mana secara umum langkah-langkah yang ditempuh dalam proses perencanaan/perumusan tata tertib dilakukan secara sistematis mulai dari tahapan penggalian data, perumusan tujuan hingga melakukan evaluasi atau pengawasan.

Langkah ini tentunya sesuai dengan sistematika perencanaan dimana Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan yaitu: (1) perumusan tujuan yang ingin dicapai, (2) pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, (3) identifikasi dan pengalokasian sumber yang jumlahnya selalu terbatas.

Selanjutnya yang menjadi catatan penulis dalam penelitian ini adalah proses perencanaan dibuat secara kolektif. Dari lokasi penelitian ditemukan bahwa perumusan atau penyusunan tata tertib dalam prakteknya melibatkan berbagai pihak (kolektif), baik kepala madrasah sebagai pimpinan, wakil kepala madrasah, unsur guru, bahkan dari orang tua. Di sisi lain, pihak-pihak yang dilibatkan dalam perumusan tata tertib memang diharapkan dapat memberikan kontribusi teknis mengenai cara atau model tata tertib, perilaku yang dilarang, strategi implementasi tata tertib, dan konsekuensi dari tata tertib yang diberlakukan, baik atau buruk. Sehingga, tata tertib dapat dipertanggungjawabkan.

Pelibatan pihak-pihak terkait dalam perencanaan bias disebut sebagai perencanaan partisipatif yaitu proses perencanaan yang diwujudkan dalam

musyawarah ini, dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (*stakeholders*). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah. Tujuannya agar setiap guru diharapkan mampu memberikan masukan sesuai dengan pengetahuannya.

Selanjutnya perumusan yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam perumusannya sesuai dengan unsur-unsur manajemen. Dalam usaha untuk mencapai tujuan, manajemen menggunakan berbagai sumber daya atau faktor produksi yang tersedia dengan cara yang efektif dan efisien, sumber atau faktor tersebut adalah men, aterial, machanies, methods, money, machanics dan market. Sumber atau faktor-faktor tersebut diatur oleh manajemen agar mempunyai daya guna dan dapat berhasil guna, terintegrasi dan terkoordinir dalam mencapai tujuan subsistem mampu mencapai tujuan sistem dari sebuah lembaga secara optimal. Manajemen merupakan proses pemanfaatan sumber daya organisasi secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi.

Kemudian, pelaksanaan tata tertib madrasah sangat tergantung pada pemahaman pihak-pihak terkait terhadap tata tertib yang disusun, maka dilakukanlah sosialisasi, hal ini juga dilakukan di MAN 2 Banjarmasin. Sosialisasi tata tertib perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik isi tata tertib tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat membuat siswa dan orang tua siswa memahami mengenai tata tertib adalah dengan melakukan sosialisasi dengan tatap muka (rapat). Sehingga dalam

mensosialisasikan atau mengkomunikasikan tata tertib tersebut kepada seluruh siswa dan orang tua dilakukan dengan berbagai cara. Pemilihan konsep sosialisasi yang akan digunakan bergantung pada situasi dan kondisi.

Secara umum sosialisasi tata tertib madrasah pada saat kegiatan-kegiatan resmi seperti upacara dan kegiatan Masa Orientasi Siswa (Matsama). Sosialisasi tata tertib madrasah pada saat upacara dan kegiatan Matsama lebih efektif dan efisien karena siswa berkumpul dalam satu tempat melakukan pemanggilan orang tua, menempel di tempat strategi. Selain itu tata tertib dilaksanakan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar dengan system poin dan melibatkan seluruh komponen madrasah. Selama ini tahapan pelaksanaan berdasarkan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas.

Tahapan terakhir dalam implementasi tata tertib adalah pengawasan yang dilakukan atas berjalannya tata tertib dan evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan tata tertib. Dalam konteks ini, pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan pencapaian program kerja termasuk kebijakan tata tertib. Untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen

dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Secara umum pengawasan yang dilakukan belum mengacu pada prinsip pengawasan yang komperhensif.

Selanjutnya terkait dengan pengawasan yang dijalankan selama ini pemimpin tidak melakukan pengawasan secara terprogram. Padahal agar pengawasan yang dijalankan lebih maksimal, maka perlu perubahan gaya pengawasan yang dijalankan. Dalam konteks ini, agar fungsi pengawasan mencapai hasil maksimal, maka pemimpin organisasi yang melaksanakan fungsi di atas harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan, yaitu:

1. Pengontrolan harus berlangsung terus menerus bersama dengan pelaksanaan dan pekerjaan.
2. Pengontrolan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara obyektif.
3. Pengontrolan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga menemukan kelemahan dalam pelaksanaan.
4. Pengontrolan harus memberikan bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan.
5. Pengontrolan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi.
6. Pengontrolan harus bersifat fleksibel.
7. Pengontrolan harus berorientasi pada perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.
8. Pengontrolan dilakukan terutama pada tempat yang strategis atau pada kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan.

9. Pengontrolan harus membawa dan mempermudah dalam melakukan setiap tindakan perbaikan.

Selanjutnya berdasarkan hasil dilapangan bahwa problematika yang dialami madrasah dalam implementasi tata tertib bersumber dari faktor guru dan siswa. Faktor guru berkaitan dengan konsistensi guru dalam mendukung tata tertib. Ada yang konsisten ada juga yang tidak konsisten.

Namun demikian berdasarkan data di lapangan pelanggaran yang dilakukan tidak berkaitan dengan pelanggaran berat seperti pelanggaran anak remaja yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dalam konteks ini, secara umum perbuatan melanggar atau menyimpang pada anak meliputi:

- a) Pergaulan bebas yang menjerumuskan pada kebebasan sex
- b) Kenaklan siswa, misalnya: pencurian uang di madrasah atau ditempat lain, berbicara jorok yang tidak terkontrol, mengganggu orang lain secara berlebihan
- c) Membolos madrasah atau sering absen tanpa keterangan yang jelas.

Mengacu pada jenis pelanggaran di atas, maka pelanggaran tata tertib di MAN 2 Banjarmasin masih dalam kategori pelanggaran ringan. Hal ini Nampak pada temuan di lapangan, di mana pelanggaran hanya berkaitan dengan persoalan keterlamabatan atau tidak memakai atribut secara lengkap, rambut panjang (bagi laki-laki).

c. MAN 3 Banjarmasin

Tidak jauh berbeda dengan 2 madrasah di atas, Di MAN 3 Banjarmasin penyusunan tata tertib madrasah juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait atau secara kolektif. Seperti yang disampaikan oleh Kepala MA 3 bahwa:

“Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di madrasah yaitu dilakukan usaha bersifat preventif yakni pemberlakuan tata tertib siswa untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran tata tertib madrasah. Tata tertib dirumuskan secara kolektif, yang artinya melibatkan berbagai pihak terkait, seperti wakil kepala madrasah, unsure guru dll. . (W/K. MAN 3 Banjarmasin)

Hal yang sama juga disampaikan oleh wakamad kesiswaan bahwa:

“Penyusunan tata tertib melibatkan berbagai pihak sehingga dapat dipahami oleh seluruh sivitas akademika di madrasah”. (W/Wakasis MAN 3 Banjarmasin)

Selanjutnya penulis melakukan beberapa wawancara dengan unsur guru, yang menjelaskan bahwa:

“Tata tertib adalah hasil keputusan-keputusan yang dibuat secara arif dan bijaksana untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan, khususnya berkaitan dengan perilaku perilaku yang harus ditatati oleh siswa. Semua aturan disiplin dan tata-tertib yang berkaitan beserta sanksi atas pelanggarannya, dibahas secara kolektif untuk mencari yang terbaik”. (W/G. MAN 3 Banjarmasin)

Dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa kebijakan tata tertib siswa dibuat secara kolektif oleh seluruh warga madrasah antara lain kepala madrasah, wakil kepala madrasah dan guru, bahkan juga dibahas ditingkat Osis yang memiliki tujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui kode etik saja. Dalam konteks ini, Ketertiban madrasah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara bersama-sama untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdurrachman, (Kamad MAN 3 Banjarmasin)



Wawancara dengan Pak Chairuddinnur, S. Pd (Wakasis MAN 3 Banjarmasin)

Selanjutnya penulis juga melakukan penelusuran berkaitan dengan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses perencanaan atau perumusan tata tertib di madrasah.

“Untuk tata tertib dirumuskan dengan Proses perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan kami. Perencanaan tata tertib merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dimana beberapa fasenya dihubungkan dengan fase awal melalui perputaran umpan balik. Kami disini merumuskan yang akan capai dan tentunya akan kami evaluasi tentang bagaimana capaian kami dalam tata tertib”.

Berkaitan dengan proses penyusunan atau langkah-langkah yang digunakan dalam merumuskan tata tertib seperti yang disampaikan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, bahwa:

“Tata tertib dibuat tentunya dengan perencanaan yang matang dan dipersiapkan terlebih dahulu, seperti menentukan tindakan untuk mencapai tujuan, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang, mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan dan mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya yang berkaitan dengan tata tertib.

Dengan demikian dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa dalam merumuskan tata tertib menggunakan langkah-langkah penting di mana Proses dibahas sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Dalam merumuskan tata tertib seperti yang penulis temukan di lapangan, ada beberapa langkah penting yang dilakukan oleh pihak madrasah seperti dengan melakukan kajian terhadap persoalan yang berkaitan dengan tata tertib. Persoalan mengarahkan perilaku-perilaku siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya merumuskan tujuan. Tujuan berhubungan dengan apa yang diinginkan dari keberadaan tata tertib. Tantangan yang paling sulit merumuskan tata tertib adalah bagaimana tata tertib yang berlaku dapat dipahami dengan baik oleh siswa dan dilaksanakan dengan kesadaran bukan atas dasar paksaan.

Disisi lain, tata tertib yang dirumuskan juga berorientasi pada kebutuhan masa depan, dimana tata tertib yang dibuat diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan. Untuk itu prediksi sangat penting bagi penilaian dan pemilihan alternative. Dalam perencanaan ini memiliki 2 aspek utama: 1) Perilaku siswa yang fenomenal yang mulai muncul dan bertentangan dengan nilai-nilai islam; 2) mencari solusi terhadap persoalan-persoalan perilaku yang muncul pada masa akan datang.

Selanjutnya melakukan Evaluasi. Evaluasi dilakukan saat para tim penyusun tata tertib memiliki sejumlah alternatif yang dapat dilaksanakan dalam penyusunan tata tertib. Setelah melewati semua proses sebelumnya maka suatu rencana sudah dianggap matang dan siap untuk direalisasikan (implementasi). Proses implementasi di MAN 3 biasanya melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan sosialisasi-sosialisasi yang akan dibahas selanjutnya.

Dari uraian di atas, ditemukan bahwa perumusan atau penyusunan tata tertib dalam prakteknya melibatkan berbagai pihak (kolektif), baik kepala madrasah sebagai pimpinan, wakil kepala madrasah, unsur guru, unsur siswa bahkan dari orang tua dan juga komite jika diminta. Dalam hal ini, pihak-pihak yang dilibatkan dalam perumusan tata tertib memang diharapkan dapat memberikan kontribusi teknis mengenai cara atau model tata tertib, perilaku yang dilarang, strategi implementasi tata tertib, dan konsekuensi dari tertib yang diberlakukan, baik atau buruk. Sehingga, tata tertib dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya di MAN 3 Banjarmasin.

Tidak jauh berbeda dengan dua madrasah di atas, MAN 3 Banjarmasin dalam hal pembentukan disiplin siswa dilakukan melalui pengimplementasian tata tertib madrasah yang dimulai dari sosialisasi. Tata tertib madrasah menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk membentuk disiplin siswa.

Seperti yang disampaikan oleh wakil kepala madrasah bahwa “Sosialisasinya dilakukan dengan cara memanggil orang tua ke sekolah pada saat rapat Komite Madrasah agar semua orang tua bias memahami dengan baik terhadap peraturan tata tertib. Untuk siswa, tata tertib disampaikan pada saat awal masuk madrasah seperti kegiatan matsama ataupun pada saat apel senin.” (W/WK. MAN 3 Banjarmasin). Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa cara madrasah dalam melakukan sosialisasi tata tertib dilakukan pada saat matsama, penempelan tata tertib di mading ataupun tempat-tempat strategis. Selanjutnya biasanya siswa dihimbau untuk senantiasa mematuhi tata tertib madrasah pada acara-acara tertentu. Selanjutnya pelaksanaan tata tertib madrasah melibatkan seluruh komponen madrasah baik kepala madrasah, guru, karyawan, dan seluruh siswa. Hal ini sesuai dengan penuturan kepala madrasah:

“Semua komponen madrasah terlibat dalam pelaksanaan tata tertib baik itu kepala madrasah, guru, karyawan, dan seluruh siswa. Semuanya harus mematuhi tata tertib yang ada. Melalui implementasi tata tertib di madrasah pembentukan disiplin siswa dapat terbentuk”. (W/K. MAN 3 Banjarmasin)

“Yang jelas dengan mengimplementasikan tata tertib madrasah kepada siswa ini dapat membentuk disiplin mereka. Diharapkan tata tertib dilaksanakan dengan adanya kesadaran bagi siswa untuk selalu mematuhi tata tertib madrasah yang ada.”

Senada dengan informasi tersebut, informasi lain juga mengemukakan bahwa upaya madrasah dalam membentuk disiplin siswa melalui implementasi

tata tertib dilakukan dengan memberikan contoh dan memberikan sanksi tegas kepada siswa yang melanggar sehingga takut dan tidak mengulangi pelanggaran. Lebih jauh dijelaskan bahwa implementasi tata tertib lebih menitikberatkan pada pembiasaan. Di madrasah ini sanksinya sangat tegas. Jadi jarang ada yang melanggar paling yang melanggar hanya satu dua orang saja. Salah satu siswa yang diwawancarai menjelaskan bahwa:

“Penerapan sanksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran yang membuat saya jadi takut untuk melanggar tata tertib madrasah. Hal ini yang bikin saya jadi disiplin. Disamping itu pelaksanaan tata tertib madrasah yang ketat juga membuat saya jadi lebih disiplin.”

Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukana bahwa sistem Tata Tertib di MAN 3 merupakan hasil dari penggalian antara unsure-unsur kebutuhan siswa dan madrasah. Pemberian sanksi pelanggaran tata tertib madrasah di MAN 3 berdasarkan poin, dicatat dalam buku catatan kedisiplinan, di mana setiap pelanggaran tata tertib akan diberikan poin perkalian yang menunjukkan kesalahan yang diperbuat. Sanksi akan diberikan sesuai dengan derajat kesalahan yang telah ditentukan dalam tata tertib madrasah. Sanksi digunakan untuk menghukum perbuatan/tingkah laku dianggap tidak sesuai dengan norma. Pemberian hukuman memperhatikan tingkat perkembangan siswa yang menerima hukuman melalui hukuman normatif yaitu hukuman yang memperbaiki moral siswa. Dengan hukuman ini guru berusaha mempengaruhi kata hati siswa, menginsyafkan siswa terhadap perbuatannya yang salah, dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan. Pemberian sanksi berupa tindakan menginsyafkan dengan mempengaruhi kata hati untuk memperbaiki moral siswa, menurut Weber termasuk dalam tindakan rasionalitas nilai. Rasionalitas nilai lebih

menekankan bahwa tindakan ditentukan oleh keyakinan yang penuh kesadaran dan komitmen terhadap tatanan nilai yang luhur. Tatanan nilai seperti moral siswa yang baik merupakan nilai absolut yang diyakini sebagai tujuan tindakan yang dilakukan. Apabila siswa memenuhi poin 25 maka akan dilakukan panggilan pertama, kemudian poin 50 panggilan kedua, dan apabila siswa mendapat poin sama dengan atau lebih besar 75 maka siswa tersebut tidak akan naik kelas.

Secara umum dapat dikatakan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa implementasi tata tertib madrasah adalah sosialisasi tata tertib madrasah pada saat kegiatan-kegiatan resmi seperti upacara dan kegiatan Masa Orientasi Siswa (Matsama) berjalan sesuai dengan target madrasah. Sosialisasi tata tertib madrasah pada saat upacara dan kegiatan Matsama lebih efektif dan efisien karena siswa berkumpul dalam satu tempat melakukan pemanggilan orang tua, menempel di tempat strategi. Selain itu tata tertib dilaksanakan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar dengan system poin dan melibatkan seluruh komponen madrasah. Selanjutnya menurut Kepala MAN 3 menjelaskan:

“Untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tata tertib pengawasan sesuai dengan yang diharapkan dan untuk mengetahui tujuan dan hasil yang dicapai pada setiap kegiatan pembinaan, pemantauan pelaksanaan di lapangan, penilaian kinerja guru dan/atau kepala madrasah”.

Dari ungkapan di atas, nampak pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah belum menetapkan standar pengawasan yang telah ditetapkan, atau membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dalam pengawasan juga belum menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang

dipergunakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Padahal secara umum pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Dari hasil wawancara juga dapat dijelaskan bahwa pengawasan pada hakekatnya merupakan aktifitas dalam usaha mendalikan, menilai dan mengembangkan pelaksanaan tata tertib agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, fungsi utama daripada pengawasan adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata tertib untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain adalah menilai dan memperbaiki factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tata tertib. Selain itu untuk mengkoordinasikan semua usaha, menganalisis situasi, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap staf, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan dan meningkatkan kemampuan kinerja.

Pelaksanaan tata tertib madrasah akan dapat berjalan dengan baik jika guru, aparat madrasah dan siswa telah saling mendukung terhadap tata tertib madrasah itu sendiri. Kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib madrasah yang diterapkan di madrasah. Setiap elemen di lingkungan madrasah memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam penegakan tata tertib madrasah. Penegakan tata tertib madrasah merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari perumusan/penyusunan tata tertib madrasah yang telah di setuju oleh pemangku madrasah. Namun masih terdapat ketidakkonsisten sebagian guru dalam penegakan tata tertib. Padahal tata tertib

memiliki posisi strategis dalam menjamin keretlaksanaan pembelajaran dengan baik. Tata tertib madrasah merupakan pedoman bagi madrasah untuk menciptakan suasana madrasah yang aman dan tertib sehingga akan terhindar dari kejadian-kejadian yang bersifat negatif. Hukuman yang diberikan ternyata tidaklah ampuh untuk menangkal beberapa bentuk pelanggaran, malahan akan bertambah keruh permasalahan

Tujuan dari adanya tata tertib madrasah merupakan salah satu alat/sarana pendidikan moral. Penegakan tata tertib madrasah merupakan tindakan rasionalitas yang dilakukan pihak madrasah untuk mencapai tujuan tata tertib tersebut. Rasionalitas yang dibangun, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan proses berpikir ulang dengan berbagai macam pertimbangan yang menjadi tujuan untuk menjatuhkan pilihan berikutnya.

Sama halnya di MAN 1 dan MAN 2 kendala yang dihadapi ada dua yaitu Pertama, faktor guru dan faktor siswa. Di madrasah guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk disiplin siswa. Guru selalu memberikan contoh dan teladan sehingga menjadi panutan untuk siswa agar mematuhi tata tertib di madrasah, namun seperti yang sudah disebutkan di atas masih ada guru yang blum konsisten dalam penegakan tata tertib. Kedua, faktor siswa, yaitu kurangnya kesadaran siswa dalam mematuhi tata tertib madrasah. Kurangnya kesadaran diri siswa akan pentingnya disiplin dalam mematuhi peraturan terlihat dari masih ada beberapa siswa yang terlambat masuk madrasah, kerapian pakaian dan kelengkapan atributnya, keluar kelas ketika jam kosong atau belum ada guru di dalam kelas, suasana kelas ramai ketika guru belum masuk kelas. Hal ini terjadi

karena jumlah siswa yang terlalu banyak menyebabkan guru tidak bisa mengontrol semua siswa sehingga pelanggaran tata tertib masih saja terjadi dan banyaknya kelas yang jauh lokasi pengawas.

Faktor lainnya terjadinya pelanggaran siswa adalah persoalan luar atau dari keluarga. Seperti orang tua yang bercerai menyebabkan siswa menjadi kurang perhatian dan kepedulian sehingga siswa mudah melakukan pelanggaran tata tertib seperti membolos atau sering terlambat. Selain persoalan keluarga juga terdapat persoalan lingkungan, dimana pergaulan siswa banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya sehingga berdampak pada perilaku siswa. Seperti yang disampaikan oleh Wakil kepala bidang kesiswaan MA 3 bahwa:

“Pelanggaran dalam sudah menjadi hal yang biasa karena kondisi emosional siswa berkaitan dengan pergaulan dimana ia berada. Berdasarkan hasil observasi, pelanggaran yang sering terjadi dan menonjol adalah terlambat kemudian seragam yang dipakai setiap hari senin sampai hari kamis berbeda dengan pakaian yang dipakai hari jumat dan sabtu. Namu pelanggaran yang tidak nampak dan jarang sekali ditemukan adalah merokok dan penggunaan obat-obatan”.

Lebih jauh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Man 3 dijelaskan bahwa pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa menjadi perhatian yang sangat penting untuk menciptakan madrasah yang aman, tentram, tertib dan bermartabat agar tercapai pembentukan karakter siswa. Langkah yang dilakukan di MAN 3 adalah dengan pembinaan. Hal ini untuk memberikan dampak secara psikologis dengan penanaman nilai-nilai keagamaan diantaranya lewat pentingnya menunaikan ibadah shalat. Pelaksanaan bimbingan spiritual ini termasuk juga program tarbiah untuk lebih memahami nilai-nilai keagamaan dalam rangka pentingnya madrasah dan tertib pada peraturan yang ada.

Secara keseluruhan jika di analisis berkaitan dengan implemtasi tata tertib mulai dari perencanaan sampai pengawasan ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Dari hasil penelitian nampak bahwa dalam proses perencanaan banyak aspek yang dibahas secara sistematis mulai dari pelibatan sumber daya yang kompeten hingga perumusan tujuan yang ingin dicapai. Langkah ini tentunya sesuai dengan elemen-elemn yang harus dipenuhi dalam perencanaan.

Elemen perencanaan menurut Johnson mesti dipenuhi para manajer dalam pekerjaannya, yaitu :

- a) Sasaran, Sasaran adalah rencana terpadu sebab kondisi khusus masa depan yang diimpikan para perencana akan terwujud dengan memuaskan,
- b) Tindakan-Tindakan, Tindakan adalah kekhususan untuk mencapai sasaran
- c) Sumberdaya, adapun sumberdaya adalah tuntutan yang diperlukan dalam melakukan tindakan
- d) Implementasi, akhirnya adalah rencana harus termasuk cara dan tujuan dilaksanakan sesuai dengan maksud tindakan. Pelaksanaan mencakup tugas-tugas dan perintah terhadap personal untuk merencanakan rencana-rencana yang ditetapkan
- e) Misi, adalah suatu bagian tujuan berkelanjutan, atau alasan bagi adanya perusahaan. Dalam hal ini misi adalah pernyataan yang secara luas dari sasaran dasar dan ruang lingkup suatu unit organisasi. Pernyataan misi organisasi memberikan arah dan bimbingan bagi individu, kelompok dan manajer melalui organisasi, dan

f) Sasaran, begitu misi dapat dipahami maka sasaran khusus dapat dikembangkan. Sasaran adalah keinginan akhir dan hasil akhir suatu aktivitas. Sasaran disusun setiap level manajer dalam organisasi, baik level terendah organisasi, seharusnya konsisten dengan sasaran yang dirumuskan pada level tertinggi.

Selanjutnya yang menjadi catatan penulis dalam penelitian ini adalah proses perencanaan dibuat secara kolektif. Dari lokasi penelitian ditemukan bahwa perumusan atau penyusunan tata tertib dalam prakteknya melibatkan berbagai pihak (kolektif), baik kepala madrasah sebagai pimpinan, wakil kepala madrasah, unsur guru, unsur siswa bahkan dari orang tua. Di sisi lain, pihak-pihak yang dilibatkan dalam perumusan tata tertib memang diharapkan dapat memberikan kontribusi teknis mengenai cara atau model tata tertib, perilaku yang dilarang, strategi implementasi tata tertib, dan konsekuensi dari tertib yang diberlakukan, baik atau buruk. Sehingga, tata tertib dapat dipertanggungjawabkan.

Pelibatan pihak-pihak terkait dalam perencanaan bias disebut sebagai perencanaan partisipatif dengan melibatkan sumber daya yang ada. Sumber Daya disini adalah manusia, yaitu seluruh elemen penting di madrasah, sehingga dalam pelibatan tersebut akan membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. Di sisi lain pelibatan berbagai unsure ini juga sesuai dengan prinsip manajemen, yaitu solidaritas antar sersama. Prinsip kesatuan sangat diharapkan diseluruh lingkungan kerja. Masing-masing pekerjaan bersama menjalin komunikasi dan ineraksi yang baik sesama para pekerja. Terkait dengan pengawasan yang perlu menjadi catatan adalah tidak terprogramnya pengawasan yang dilakukan.

Pengawasan tidak berdasarkan pada jadwal yang tetap tetapi lebih bersifat kondisional, langkah tersebut dilaksanakan karena asas yang dibangun di madrasah adalah asas kepercayaan. Sehingga tidak ada bentuk pengawasan yang sistematis. Mengenai asas kepercayaan yang dibangun oleh komite di satu sisi ada benarnya, akan tetapi program kerja tidak hanya selalu bergantung pada sikap saling percaya.

Sebagai manusia, semua hubungan dibangun atas dasar saling percaya. Namun asas kepercayaan bukanlah alasan untuk menghilangkan nilai-nilai profesionalisme dalam pekerjaan. Dalam konteks ini, pihak terkait perlu melakukan kerja yang tidak hanya dibangun atas dasar saling percaya, tetapi berdasarkan asas profesionalisme.

Selanjutnya berkaitan dengan hambatan juga sama dengan dua madrasah di atas, yaitu persoalan konsistensi guru dan masih adanya siswa yang melanggar. Pelanggaran hanya berkaitan dengan kelengkapan atribut, terlambat ataupun tidak tadarus. Dapat dikatakan pelanggaran tata tertib lebih mengarah pada ringan dan sedang. Bentuk-bentuk dan tingkat kenakalan santri atau remaja secara kualitatif dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu: pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran yang dilakukan siswa tersebut timbul karena adanya faktor, diantaranya faktor keluarga, lingkungan sekolah, dan faktor masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan madrasah. Masyarakat dapat memberi pengaruh terhadap perilaku anak, membentuk kebiasaan pengetahuan anak.

2. Peran Komite dalam Implementasi Tata Tertib Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri Di Kota Banjarmasin

a. MAN 1 Banjarmasin

Komite madrasah sebagai organisasi mitra madrasah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di madrasah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel madrasah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Madrasah diharapkan dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di madrasah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di madrasah/madrasah.

Peran yang dijalankan komite madrasah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Di samping itu, komite madrasah juga berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sejauh penelusuran penulis baik melalui wawancara, observasi serta dokumentasi, peran komite madrasah dalam tata tertib merujuk pada program

kerja tahunan. Program kerja tahunan tersebut dirumuskan di awal tahun dengan melibatkan seluruh pengurus komite serta dihadiri oleh kepala madrasah, wakamad serta pengurus penting di madrasah untuk memberikan masukan yang berarti bagi komite madrasah. Hal tersebut terungkap melalui hasil wawancara dengan ketua komite madrasah, yang mengatakan:

"Ada perencanaan yang disusun dalam program kerja dan lebih khusus lagi adalah program kerja tahunan. Pertimbangan rutin yang diberikan setiap tahun adalah dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan komite tidak hanya berkutat pada masalah uang pangkal siswa baru, tapi juga dalam KBM, selain itu juga memberikan pertimbangan pada masalah-masalah madrasah jika diinginkan, termasuk tata tertib.

Dalam perumusan program kerja, kami (komite) selalu dilibatkan, khususnya mengenai perumusan masalah-masalah yang dihadapi oleh madrasah, termasuk tata tertib walaupun tidak secara khusus. Dalam hal biasanya anggota komite memberikan masukan terkait dengan tata tertib di madrasah. Namun demikian hal tersebut hanya sebatas saran saja".

Dengan demikian peran komite dalam tata tertib dirumuskan dalam program kerja tahunan. Dalam prosesnya perencanaan yang dilakukan berdasarkan isu-isu sentral yang ada di madrasah, termasuk tata tertib. Dengan kata lain pertimbangan-pertimbangan yang diberikan melalui mekanisme perumusan masalah-masalah sensitif dan persoalan tata tertib tidak dibahas secara khusus. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh ketua komite kepada peneliti, yang menyatakan:

"Selaku komite, kami melakukan sharing (dengar pendapat) dengan guru dan kepala madrasah serta masyarakat yang dilakukan oleh madrasah. Selanjutnya setelah menentukan masalah-masalah penting tersebut, baru kemudian komite menindaklanjuti dengan merumuskan poin-poin penting yang harus dilakukan, tentunya hal tersebut juga menyinggung masalah tata tertib. Jadi proses tata tertib yang kami lakukan lebih berdasar isu-isu sentral di madrasah dan itu

sifatnya hanya masukan bukan merumuskan secara khusus. Dengan langkah tersebut kami berharap bisa memberikan kontribusi bagi madrasah, khususnya peran kami sebagai komite madrasah."

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh komite madrasah melibatkan seluruh komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengacu pada uraian yang dikemukakan oleh komite madrasah, tampak jika pertimbangan yang dilakukan komite sebagai dewan pertimbangan berdasar pada ruang lingkup isu-isu penting, termasuk tata tertib. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ketua komite, menurut kepala madrasah yang mengatakan bahwa:

"Program kerja berdasarkan hasil analisis terhadap isu ataupun kebutuhan dari pihak madrasah, termasuk masalah tata tertib. Selama ini masukan komite memang tentang tata tertib berdasarkan hasil kesepakatan dan analisa komite dengan pihak madrasah.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa program kerja komite yang dilakukan di awal tahun memang tidak secara khusus membahas tata tertib, tetapi jika memang dibutuhkan dan dimasukkan dalam pembahasan. Hasil wawancara dengan salah satu anggota komite yang mengatakan:

"Masukan komite tentang tata tertib dilakukan pas ketika rapat, dan semua itu membahas masalah-masalah madrasah, kemudian komite memberikan pertimbangan dan masukan".

Berdasarkan temuan data di lapangan terkait peran komite dalam tata tertib, pelaksanaan program yang telah direncanakan dilaksanakan melalui mekanisme rapat dengan warga madrasah serta masyarakat. Selanjutnya berdasarkan penuturan ketua komite dijelaskan bahwa:

"Pelaksanaan pemberian masukan untuk tata tertib dilakukan pada saat rapat komite yang diikuti oleh seluruh pengurus inti komite, jajaran madrasah, masyarakat/perwakilan orang tua, guru. Untuk hal ini dilakukan secara tetap di awal tahun. Setelah rapat komite yang merumuskan rencana-rencana yang akan kami lakukan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, termasuk tata tertib. Contohnya, kami merumuskan rencana memberikan pertimbangan terhadap aturan-aturan terbaru tata tertib sesuai isu yang berkembang di masyarakat. "

Dengan demikian, implementasi yang dilakukan dalam tata tertib dilakukan pada saat rapat. Pelaksanaan tersebut dilakukan pada pemberian masukan-masukan yang diberikan komite kepada pihak madrasah. Komite Madrasah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para stakeholder pendidikan madrasah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Salah satu peran komite di madrasah adalah memberikan masukan-masukan isu-isu yang krusial di madrasah, termasuk berkaitan dengan tata tertib.

Bila ditelaah lebih jauh terhadap hasil temuan di lapangan, dapat dikatakan proses yang dilakukan komite dalam memberikan masukan tata tertib dilakukan pada rapat program kerja tahunan. Rapat program kerja tahunan itu sendiri, lebih mengarah pada program-program fisik, seperti pembuatan pagar madrasah ataupun pembangunan lainnya (lihat foto dalam lampiran). Namun demikian dalam kerangka kerja yang ditetapkan komite, perhatian mereka kepada madrasah tidak hanya berfokus pada masalah fisik, tetapi lebih dari itu, komite juga *concern* terhadap isu-isu lain di madrasah.

Hal ini sesuai dengan keberadaan komite, di mana dibentuknya Komite Madrasah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat madrasah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas madrasah. Komite madrasah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Madrasah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Madrasah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocay*) dan kemitraan (*partnership*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Dalam konteks ini, bila ditelaah lebih jauh, proses pemberian masukan dilakukan komite terbagi menjadi dua, yaitu mengacu pada isu-isu sentral (khusus) dan dengar pendapat dengan para jajaran madrasah (umum). Pemberian masukan khusus lebih diarahkan pada masalah-masalah di madrasah, seperti masalah tata tertib. Sedangkan pertimbangan umum diberikan pada masalah umum, termasuk tata tertib.

Perencanaan pada aspek khusus berdasarkan pada upaya-upaya sistematis komite untuk memberikan yang terbaik kepada siswa, yang juga berposisi sebagai pelanggan di madrasah. Di sini komite berkeinginan untuk memberikan yang terbaik kepada madrasah melalui pertimbangan-pertimbangan yang mereka berikan. Kepedulian mereka terhadap karakter anak (siswa) layak diapresiasi. Apa yang dilakukan komite yang ikut memberikan masukan dalam tata tertib perlu diberikan apresiasi, yang tidak hanya terpaku pada rencana pembangunan fisik,

tapi juga pada masalah-masalah lain di madrasah. Kiranya benar apa yang dikatakan oleh James Menzies Black bahwa manusialah kunci ke arah keberhasilan rencana.

b. MAN 2 Banjarmasin

Di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 044/u/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah dijelaskan bahwa Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra madrasah, jalur pendidikan madrasah maupun jalur pendidikan luar madrasah. Sedangkan Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- masing satuan pendidikan, seperti Komite Madrasah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Madrasah, Dewan madrasah, Majelis Madrasah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.

Tujuan dibentuknya komite madrasah sebagai suatu organisasi masyarakat madrasah adalah sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Sesuai dengan tujuan komite, di mana komite selalu pendukung dalam setiap program ataupun kebijakan madrasah, termasuk tata tertib di lingkungan madrasah. Tanpa adanya dukungan yang nyata dari pihak komite, praktis pihak madrasah dipaksa bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan program-program yang telah dirumuskan, seperti implementasi tata tertib. Atas dasar itu dukungan baik bersifat moral maupun materiil dari pihak komite akan sangat membantu pihak madrasah dalam menjalankan tata tertib madrasah.

Wujud dukungan inilah yang diberikan komite madrasah kepada MAN 2 Model Banjarmasin, melalui rencana-rencana strategisnya, termasuk memberikan masukan tentang tata tertib. Menurut ketua komite MAN 2 Model Banjarmasin dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa:

"Rencana kerja komite selama ini tidak hanya sebagai organisasi yang memberi pertimbangan atau masukan untuk ppembangun semata, tapi lebih dari itu, termasuk tata tertib. Di sini kami memberikan dukungan-dukungan yang nyata kepada pihak madrasah, baik dukungan moril maupun dukungan materiil. Dukungan moril biasanya kami lakukan ketika madrasah perlu masukan untuk implementasi tata tertib. Sedangkan dukungan lainnya kami bisa secara langsung memberikan masukan tentang tata tertib. Dukungan yang kami berikan kepada pihak madrasah bisa dilihat program-program kerja tahunan kami, di mana di dalam rapat terkadang ada pembahasan yang menyinggung masalah tata tertib. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa dukungan-dukungan yang diberikan untuk tata tertib tidak secara khusus tetapi jika memang diperlukan (masukan).

Selanjutnya ketua komite madrasah mengatakan bahwa rangkaian-rangkaian identifikasi untuk pengambilan keputusan termasuk tata tertib dilakukan demi kebaikan bersama, seperti penyusunan tata tertib.

Dan yang lebih penting kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak. Ungkapan yang tidak jauh berbeda juga dinyatakan oleh anggota komite yang menyatakan:

"Proses dukungan komite kepada penyusunan tata tertib madrasah bukan pada asas kepentingan sesaat, tetapi lebih merujuk pada kepentingan madrasah secara utuh namun tidak dibahas secara khusus".

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan di atas, menurut sekretaris komite MAN 2 model Banjarmasin yang mengatakan bahwa:

"Dukungan yang kami berikan bersifat masukan, dan juga motivasi yang diberikan kepada jajaran madrasah ataupun siswa untuk melaksanakan tata tertib"

Senada dengan ungkapan di atas, menurut anggota komite MAN 2 Model Banjarmasin yang mengatakan bahwa:

"Bantuan/masukan untuk pelaksanaan tata tertib diberikan kepada madrasah jika memang dibutuhkan".

Menurut ketua komite, proses pemberian masukan yang dilakukan komite selain melalui rapat yang terjadwal tidaklah berdasarkan jadwal yang tetap, tetapi lebih bersifat fleksibel. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ketua komite MAN 2 Model Banjarmasin kepada peneliti bahwa:

"Pada dasarnya kami tidak memiliki jadwal yang tetap kapan pemberian masukan. Hanya saja pembahasan dilakukan ketika penyusunan program kerja komite. Sehingga sekali lagi kami tegaskan pemberian dukungan sesungguhnya berdasarkan pertimbangan yang matang dari pihak komite dan berdasarkan kebutuhan madrasah".

Untuk lebih menguji kebenaran data yang peneliti temukan, penulis pun melakukan wawancara dengan Kepala madrasah, yang juga memiliki posisi strategis di madrasah. Seperti yang beliau ungkapkan kepada peneliti bahwa:

"Sejauh pengamatan dan pengalaman saya berurusan dengan komite madrasah, saya menilai dukungan-dukungan yang diberikan komite kepada kami selalu berdasarkan permintaan kami khususnya berkaitan dengan tata tertib. Sebagai contoh, ketika madrasah menyusun tata tertib, komite memberikan saran agar aturan aturan juga menyentuh pada persoalan kontekstual. Sehingga bermanfaat bagi masa depan madrasah, khususnya para siswa, namun tidak dilakukan secara khusus".

Selanjutnya kepala madrasah, yang mengatakan bahwa:

"Masukan komite dilakukan ketika rapat tahunan dan juga pada waktu-waktu yang kondisional, khususnya jika diminta".

Ungkapan tidak jauh berbeda juga disampaikan salah satu anggota komite madrasah yang mengatakan bahwa:

"Tidak ada permintaan secara langsung kepada komite MAN 2 untuk menyusun tat tertib. Kami diminta untuk memberikan masukan pada isu-isu kekinian berkaitan dengan tata tertib".

Selanjutnya pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh sekretaris komite MAN 2 Model Banjarmasin, yang mengungkapkan bahwa:

"Komite selama ini bekerja lebih pada instruksi berkaitan dengan tata tertib, jadi tidak ada maka kami hanya memberikan saran atau masukan. Itupun juga jika dibahas".

Dengan demikian, tidak ada wewenang yang diberikan ketua komite kepada anggotanya untuk penyusunan tata tertib. Dalam prakteknya dukungan yang diberikan komite kepada MAN 2 Model Banjarmasin jika memang dibutuhkan dalam penyusunan tata tertib. Pelaksanaan pemberian masukan tentang

implementasi tata tertib berdasarkan keinginan dari pihak madrasah, sedangkan dukungan secara khusus tidak ada. Namun secara keseluruhan Keberdaan komite madrasah bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di madrasah, yang juga telah dilaksanakan di MAN 2 Banjarmasin. Dalam konteks ini, walaupun peran yang dijalankan dalam implementasi tata tertib tidak signifikan, namun secara umum komite telah menjalankan fungsinya.

Komite madrasah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya dan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan, organisasi/dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - kebijakan dan program pendidikan
 - Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBS);
 - Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - Kriteria tenaga pendidikan;
 - Kriteria fasilitas pendidikan;
 - Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dalam mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, dan keluaran pendidikan pendidikan di satuan pendidikan.

Untuk memperhatikan peran dan fungsi Komite Madrasah/Madrasah tersebut, Komite Madrasah/Madrasah sesuai peran dan fungsinya dapat melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

- a) Komite Madrasah/Madrasah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program madrasah kepada stakeholder secara periodik, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasara program madrasah;
- b) Menyampaikan laporan bertanggungjawab bantuan masyarakat, baik berupa materi (dana, barang tak bergerak ataupun bergerak), non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

c. MAN 3 Banjarmasin

Dalam menjalankan perannya dalam implementasi tata tertib, komite MAN 3 Banjarmasin lebih bersifat fleksibel. Selama ini peran itu diwujudkan jika ada keluhan-keluhan maupun menyampaikan aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan ke madrasah. Peran nyata komite MAN 3 Banjarmasin dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan termasuk tata tertib dilakukan secara fliksibel. Komitmen tersebut mereka wujudkan dalam rumusan

yang cukup komprehensif melalui pertemuan komite madrasah. Hal tersebut disampaikan ketua komite MAN 3 Banjarmasin bahwa:

"Peran komite seperti tata tertib jika diminta atau ada keluhan masyarakat kepada madrasah terkait perilaku siswa, selalu kami rapatkan. Dalam hal ini prinsip yang kami gunakan adalah menjadi tempat bagi segala keluhan ataupun aspirasi masyarakat, dan sekaligus sebagai "juru bicara" bagi madrasah maupun depag terkait tata tertib. Dalam praktek rumusan kerjanya, kami mempersilahkan kepada warga madrasah, termasuk orang tua untuk menyampaikan sejumlah saran, kritik ataupun hal lainnya tentang tata tertib nantinya akan kami sampaikan ke pihak madrasah. Selama ini kami memberikan masukan tidak berdasarkan agenda khusus tetapi lebih pada fleksibilitas. Artinya ketika ada masalah, kami siap menjadi membahasnya dengan pihak madrasah".

Senada dengan dengan apa yang diungkapkan oleh ketua komite MAN 3 Banjarmasin, sekretaris komite mengatakan bahwa:

"Selama ini kami telah bekerja di atas koridor yang telah ditetapkan, seperti halnya peran kami dalam implementasi tata Tertib kami memang tidak membuat rencana-rencana kerja, tapi kami lebih bekerja pada saat ada yang perlu diselesaikan".

Selanjutnya menurut salah satu anggota komite MAN 3 Banjarmasin mengatakan:

"Perencanaan atau penyusunan ataupun terlibat implementasi tata tertib dalam arti secara khusus memang belum ada, tetapi sebagai komite kami selalu siap untuk dimintai masukan ataupun memerlukan bantuan kami. Dan tentunya setiap masukan ataupun keluhan dari masyarakat kami rumuskan kembali. Begitupun ketika ada kebijakan baru, maka akan membahasnya lebih dahulu seperti tata tertib".

Senada dengan ungkapan di atas, menurut anggota komite MAN 3 Banjarmasin yang mengatakan bahwa:

"Kami selalu membantu dan siap dengan masukan yang diberikan masukan untuk kami sampaikan ke pihak madrasah. Sebaliknya kami juga

siap menjadi penghubung jika ada kebijakan-kebijakan baru. Tetapi kami tidak merencanakan secara khusus mengenai hal ini”.

Selanjutnya menurut kepala madrasah MAN 3 Banjarmasin yang mengatakan bahwa:

"Selama ini komite telah bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya termasuk membantu persoalan-persoalan madrasah seperti tata tertib. Mengenai implementasi tata tertib memang sifatnya hanya masukan”.

Menurut penuturan ketua komite, pihaknya sebagai organisasi independen memang tidak terlepas dari kekurangan, termasuk dalam wilayah manajemen, seperti masalah-masalah madrasah. Ketua komite MAN 3 Banjarmasin:

"Selama ini kami sebagai komite telah berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Namun demikian, sebagai manusia dan kami pikir semua komite di madrasah/madrasah lain juga mengalami masalah yang sama seperti waktu karena aktivitas yang padat dan membuat kami tidak bisa total dalam bekerja. Tentunya kami dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada kami selaku komite juga masih terdapat kekurangan termasuk memberikan masukan tentang tata tertib”.

Selanjutnya apa yang disampaikan oleh ketua komite MAN 3 Banjarmasin diperkuat oleh salah satu anggota komite MAN 3 Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa:

"Setiap pengurus komite menurut saya telah terlibat secara aktif dan kooperatif dalam menjalankan perannya, walaupun tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan yang ditemukan. Seperti halnya tata tertib kami bekerja ketika ada masalah yang berkaitan dengan hal tersebut”."

Senada dengan ungkapan di atas, menurut, sekretaris Komite MAN 3 yang mengatakan bahwa:

"Menurut saya selama ini pihak komite belum pernah melakukan atau membantu implementasi tata tertib secara sistematis terkait dengan peran-perannya di madrasah, tetapi akan bekerja jika diminta saja".

Lebih jauh kepala madrasah juga membenarkan jika selama ini komite tidak terlibat secara khusus. Beliau menyatakan:

"Keterlibatan secara khusus mengenai peran komite dalam implementasi tata tertib memang belum dilaksanakan. Akan tetapi menurut kami selama ini komite telah bekerja cukup dan sangat kooperatif jika diminta mengenai masalah itu".

Menurut ketua komite selama ini pelaksanaan segala aktivitas komite yang berkaitan dengan peran komite dalam implementasi tata tertib berdasarkan kebutuhan atau permintaan madrasah. Dalam hal ini beliau mengatakan:

"Sebagai komite, kami telah menjalankan peran kami sesuai permintaan. Sebagai contohnya ketika madrasah membutuhkan kami, khususnya saya untuk hadir dalam rapat untuk menyampaikan persoalan tata tertib saya selalu berhadir. Selain itu juga kami selalu siap jika pihak madrasah menghubungi kami dalam menyelesaikan masalah-masalah orang tua siswa. Hanya saja kami pun sadar jika selama ini kami tidak bekerja dalam kerangka konsep yang jelas, termasuk dalam penjadwalan. Kami lebih aktif ketika ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan pihak madrasah maupun dengan orang tua siswa".

Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris komite MAN 3 Banjarmasin yang mengatakan bahwa:

"Ketiadaan jadwal ataupun konsep kerja komite dalam tata tertib sesungguhnya cukup berasal, karena kerja-kerja komite dalam penyusunan tata tertib hampir jarang. Sehingga jika tidak program yang membutuhkan penjelasan dari komite ataupun program dari Kementerian Agama, sehingga tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh komite untuk tata tertib. Namun demikian komite

telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Hal itu terbukti dari komitmen dan kepiawaian komite dalam memecahkan setiap permasalahan yang berhubungan dengan tata tertib. Namun demikian secara umum komite sudah menjalankan perannya sesuai dengan UU”.

Adapun peran yang dijalankan komite madrasah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.